

TRANSFORMASI TATA KELOLA DANA DESA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jemmy Tiro^{1*}, Beatus Tambaip², Ransta L. Lekatompessy³, Syahrudin⁴

^{1,3,4} Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

² Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Korespondensi: jemmytiro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip good governance, mengidentifikasi tantangan serta faktor pendukung dalam tata kelola, dan merumuskan model transformasi pengelolaan Dana Desa yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis yang dilaksanakan di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat pada April–Juli 2025. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif transparansi dan akuntabilitas telah berjalan sesuai regulasi, namun secara substantif masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kendala geografis, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Partisipasi masyarakat telah difasilitasi melalui musyawarah kampung, tetapi masih bersifat prosedural. Efektivitas dan responsivitas program relatif baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun aspek keberlanjutan memerlukan penguatan sistem pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Model transformasi yang dirumuskan menekankan integrasi prinsip good governance dalam seluruh siklus pengelolaan, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa; Good Governance; Tata Kelola; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze Village Fund management based on good governance principles, identify challenges and supporting factors in governance practices, and formulate a contextual and sustainable transformation model of Village Fund management. The research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical case study design conducted in Sagare Village, Awyu District, Asmat Regency, Indonesia, from April to July 2025. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis, and analyzed using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing with continuous verification. The findings reveal that administratively, transparency and accountability have been implemented in accordance with regulations; however, substantively they are constrained by limited human resource capacity, geographical challenges, and low financial literacy among community members. Community participation has been facilitated through village

deliberation forums but remains largely procedural. Program effectiveness and responsiveness are relatively positive in addressing basic community needs, although sustainability requires stronger monitoring systems and maintenance mechanisms. The proposed transformation model emphasizes the integration of good governance principles across all management stages, strengthening administrative capacity, and optimizing community participation as the foundation for sustainable development.

Keywords: *Village Fund; Good Governance; Governance; Community Participation; Sustainable Development.*

A. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia yang bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif (Kardina et al. 2024) (Handraini et al. 2024). Kebijakan ini memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Melalui mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke desa, Dana Desa diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat peningkatan kualitas layanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedesaan (Solissa et al. 2025) (Wulandari et al. 2025). Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan fisik, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan penguatan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif (Suryani and Firmansyah 2026).

Optimalisasi peran Dana Desa sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan desa (Al Ma'ruf et al. 2024). Tantangan yang sering muncul berkaitan dengan aspek transparansi dalam perencanaan dan pelaporan anggaran, akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan antara besarnya alokasi anggaran dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa kerap memunculkan risiko inefisiensi, maladministrasi, bahkan penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa Dana Desa benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Implementasi kebijakan Dana Desa secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan sekaligus aktor utama dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. Regulasi ini memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan

potensi lokal. Secara teknis, pengelolaan keuangan desa juga diatur melalui berbagai peraturan turunan yang menekankan tertib administrasi, kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan partisipatif, serta kewajiban pelaporan yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, Dana Desa diposisikan bukan sekadar sebagai instrumen fiskal, tetapi sebagai sarana penguatan otonomi desa dan percepatan pembangunan berbasis masyarakat (Saputra et al. 2025).

Dalam perspektif *good governance*, pengelolaan Dana Desa seharusnya mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran kepada publik, akuntabilitas melalui pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, partisipasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan, efektivitas melalui capaian program yang tepat sasaran, serta responsivitas melalui kemampuan pemerintah desa menanggapi kebutuhan riil warga. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta budaya administratif yang belum sepenuhnya adaptif terhadap prinsip tata kelola modern menjadi faktor yang menyebabkan kebijakan yang dirancang secara ideal belum sepenuhnya terwujud secara optimal (Suriadi 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi kritis terhadap praktik pengelolaan Dana Desa guna memperkecil jarak antara norma kebijakan dan realitas implementasi.

Kampung Sagare merupakan salah satu kampung yang berada di Distrik Awyu,

Kabupaten Asmat, dengan karakteristik wilayah yang relatif terpencil dan memiliki akses transportasi yang terbatas. Secara geografis, kondisi alam yang didominasi oleh wilayah perairan dan rawa menjadi tantangan tersendiri dalam mobilitas, distribusi logistik, serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dari sisi sosial, masyarakat Kampung Sagare memiliki struktur komunitas yang kuat dengan nilai-nilai adat yang masih terjaga, sehingga proses pengambilan keputusan publik sangat dipengaruhi oleh relasi sosial dan kepemimpinan lokal. Secara administratif, kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung masih dalam tahap penguatan, terutama dalam aspek tata kelola keuangan dan dokumentasi administrasi.

Kondisi geografis, sosial, dan administratif tersebut secara langsung memengaruhi pengelolaan Dana Desa. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Selain itu, sistem administrasi yang belum sepenuhnya terdigitalisasi serta lemahnya mekanisme pengawasan internal maupun eksternal berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung juga belum selalu optimal, baik karena faktor akses informasi maupun keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami dokumen perencanaan dan anggaran. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola Dana Desa di Kampung Sagare memerlukan pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan berbasis penguatan kapasitas lokal agar prinsip *good governance* dapat

diimplementasikan secara lebih efektif.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya transformasi tata kelola Dana Desa guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan pembangunan di tingkat kampung. Dalam konteks peningkatan alokasi fiskal desa yang terus berkembang, pengelolaan yang tidak disertai penguatan prinsip *good governance* berpotensi menimbulkan inefisiensi dan ketidaktepatan sasaran program. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas pada level kampung sebagai unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, kajian mengenai tata kelola Dana Desa di wilayah terpencil dan perbatasan, seperti di Kabupaten Asmat, masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk menghadirkan analisis kontekstual yang dapat memperkaya literatur serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip *good governance*, mengidentifikasi tantangan serta faktor pendukung dalam tata kelola, dan merumuskan model transformasi pengelolaan Dana Desa yang kontekstual serta berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai praktik tata kelola Dana Desa dalam perspektif *good governance*. Pendekatan kualitatif dipilih

karena mampu menggali makna, dinamika sosial, serta interaksi antaraktor dalam proses pengelolaan keuangan desa secara mendalam dan naturalistik. Sementara itu, desain studi kasus memungkinkan eksplorasi intensif terhadap fenomena tata kelola dalam satu lokus penelitian secara spesifik, sehingga dapat mengungkap realitas empiris, tantangan administratif, serta pola pengambilan keputusan yang berkembang dalam konteks sosial dan kelembagaan lokal. Dengan desain deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta lapangan, tetapi juga menganalisisnya secara sistematis berdasarkan indikator *good governance* untuk menghasilkan temuan yang relevan secara teoritis dan praktis.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat, sebagai lokus yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik wilayah yang relatif terpencil, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika tata kelola pemerintahan kampung dalam pengelolaan Dana Desa. Kondisi geografis dan sosial tersebut memberikan konteks yang relevan untuk menganalisis implementasi prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juli 2025, dengan tahapan kegiatan meliputi persiapan dan perizinan penelitian, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta verifikasi temuan lapangan. Rentang waktu tersebut dipilih agar peneliti dapat mengamati secara langsung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa dalam satu siklus kegiatan, sehingga menghasilkan gambaran empiris yang aktual, komprehensif, dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur kepada kepala kampung, aparat kampung, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan Dana Desa. Wawancara dilaksanakan pada periode April–Juli 2025 dengan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator *good governance*, meliputi transparansi (keterbukaan informasi anggaran dan program), akuntabilitas (mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan), partisipasi (keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan pengawasan), efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta responsivitas pemerintah kampung terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk mengamati proses administrasi, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta pola interaksi antara aparat kampung dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi pemerintahan kampung, seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, RPJMDes, RKPDes, serta regulasi terkait pengelolaan Dana Desa. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memverifikasi dan memperkuat temuan hasil wawancara serta memberikan gambaran normatif mengenai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan mengintegrasikan data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu

menghasilkan analisis yang komprehensif dan valid mengenai praktik tata kelola Dana Desa dalam perspektif *good governance*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta praktik tata kelola Dana Desa dari berbagai informan kunci. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara terlibat secara langsung dalam konteks sosial dan administratif kampung untuk memahami proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban program secara faktual. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen resmi seperti perencanaan anggaran dan laporan realisasi sebagai bentuk triangulasi data. Apabila diperlukan, Focus Group Discussion (FGD) juga dilaksanakan sebagai forum klarifikasi dan validasi temuan, sekaligus untuk memperoleh perspektif kolektif mengenai praktik tata kelola yang berjalan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi secara berkelanjutan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengorganisasi data lapangan agar relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi sistematis dan matriks kategorisasi untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan tetap melakukan proses verifikasi untuk menjaga konsistensi dan validitas

temuan. Analisis dikategorikan berdasarkan indikator *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas, sehingga hasil penelitian memiliki landasan konseptual yang jelas dan terukur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai transformasi tata kelola Dana Desa dalam perspektif *good governance* dan pembangunan berkelanjutan di Kampung Sagare, Distrik

Awyu, Kabupaten Asmat. Temuan penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen keuangan desa, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, responsivitas, dan keberlanjutan. Hasil ini menggambarkan kondisi empiris pengelolaan Dana Desa sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, serta pola transformasi tata kelola yang berkembang di tingkat kampung.

Tabel 1.
Ringkasan Praktik Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tahapan Tata Kelola

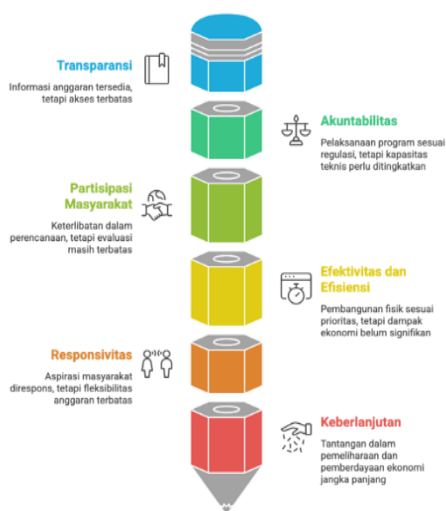
Aspek Pengelolaan	Temuan Lapangan	Kategori Analisis
Struktur Kelembagaan	Pengelolaan Dana Desa dipimpin oleh Kepala Kampung, didukung Sekretaris Kampung dan Kaur Keuangan. BPD berperan dalam fungsi pengawasan dan persetujuan perencanaan. Pembagian tugas telah ditetapkan, namun kapasitas administrasi masih terbatas.	Struktur formal berjalan, kapasitas SDM perlu penguatan
Mekanisme Perencanaan	Perencanaan diawali dengan musyawarah kampung yang melibatkan aparat dan tokoh masyarakat. Penyusunan RKPDes dan APBDes mengacu pada hasil musyawarah, namun partisipasi masyarakat umum belum merata.	Partisipatif secara prosedural, belum optimal secara substantif
Pola Pelaksanaan Program	Program didominasi pembangunan fisik (infrastruktur dasar), sementara program pemberdayaan ekonomi masih terbatas. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat.	Fokus pada pembangunan fisik, pemberdayaan perlu ditingkatkan
Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Laporan keuangan disusun sesuai format regulasi dan dilaporkan secara periodik ke pemerintah	Administratif terpenuhi, transparansi publik belum maksimal

distrik/kabupaten. Transparansi kepada masyarakat dilakukan melalui musyawarah dan papan informasi, namun belum konsisten diperbarui.

Tabel 1 menjabarkan secara struktural dan administratif, pengelolaan Dana Desa di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat telah mengikuti mekanisme regulatif. Namun, transformasi tata kelola menuju prinsip *good governance* masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi partisipasi masyarakat, serta penguatan transparansi publik dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Gambar 1. Evaluasi Tata Kelola Dana Desa di Kampung Sagare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat secara umum telah berjalan sesuai mekanisme regulatif, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance* secara substantif. Transparansi dilakukan melalui musyawarah dan papan informasi, tetapi terkendala akses dan literasi masyarakat; akuntabilitas administratif telah terpenuhi meskipun kapasitas SDM dan pengawasan masih terbatas; partisipasi masyarakat hadir dalam perencanaan namun belum optimal dalam evaluasi; efektivitas program lebih dominan pada pembangunan fisik dengan dampak ekonomi yang masih terbatas; responsivitas pemerintah kampung cukup adaptif terhadap aspirasi warga; sementara keberlanjutan pembangunan masih memerlukan penguatan pada aspek pemberdayaan dan pemeliharaan hasil program.



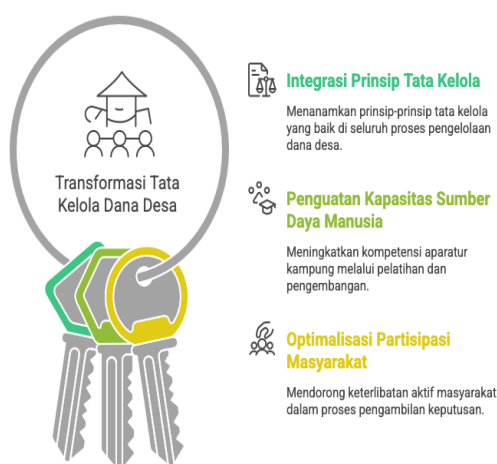
Tabel 2.
 Faktor Pendukung dan Penghambat Transformasi Tata Kelola Dana Desa

Kategori	Faktor	Temuan Hasil Penelitian	Implikasi terhadap Transformasi Tata Kelola
Faktor Pendukung	Komitmen Kepemimpinan Kampung	Kepala kampung menunjukkan komitmen dalam menjalankan mekanisme perencanaan	Memperkuat arah kebijakan dan stabilitas tata kelola.

		dan pelaporan sesuai regulasi serta mendorong musyawarah kampung secara rutin.	
	Dukungan Regulasi dan Pendamping Desa	Adanya regulasi yang jelas serta pendamping desa yang aktif membantu administrasi dan pelaporan keuangan.	Meningkatkan kepatuhan administratif dan akuntabilitas.
	Modal Sosial Masyarakat	Nilai gotong royong dan keterlibatan tokoh adat masih kuat dalam pelaksanaan program pembangunan.	Mendukung partisipasi dan legitimasi program desa.
Faktor Penghambat	Keterbatasan Kapasitas SDM	Aparatur kampung masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan berbasis sistem.	Menghambat optimalisasi transparansi dan akuntabilitas.
	Kendala Geografis dan Aksesibilitas	Akses transportasi dan komunikasi terbatas, memengaruhi koordinasi dan pengawasan program.	Memperlambat distribusi informasi dan efektivitas pelaksanaan.
	Sistem Administrasi Belum Optimal	Pengarsipan dan dokumentasi belum tertata secara sistematis dan digital.	Berpotensi menurunkan kualitas pertanggungjawaban.
	Minimnya Literasi Keuangan Masyarakat	Sebagian masyarakat belum memahami mekanisme anggaran desa dan hak pengawasan publik.	Membatasi partisipasi aktif dan kontrol sosial.

Hasil penelitian pada tabel 2 menunjukkan bahwa transformasi tata kelola Dana Desa di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat didukung oleh komitmen kepemimpinan kampung, keberadaan regulasi dan pendamping desa yang membantu aspek administratif, serta kuatnya modal sosial masyarakat seperti gotong royong dan peran tokoh adat. Namun demikian, proses transformasi

masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, kendala geografis dan aksesibilitas wilayah, sistem administrasi yang belum tertata optimal, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat yang berdampak pada terbatasnya partisipasi dan pengawasan publik terhadap pengelolaan Dana Desa.



Gambar 2. Kerangka Transformasi Tata Kelola Dana Desa.

Model konseptual transformasi tata kelola Dana Desa yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan integrasi prinsip *good governance* pada setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program, sehingga tercipta proses yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Transformasi tersebut dipandang efektif apabila ditopang oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung melalui peningkatan kompetensi administrasi, manajerial, dan literasi keuangan sebagai fondasi utama tata kelola yang profesional. Selain itu, optimalisasi partisipasi masyarakat, termasuk peran tokoh adat dan kelompok sosial, menjadi elemen strategis dalam mendorong legitimasi kebijakan serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Transformasi tata kelola Dana Desa dalam perspektif *good governance* pada Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat menunjukkan dinamika yang kompleks antara norma regulatif dan praktik administratif di tingkat lokal. Secara

konseptual, transformasi tata kelola tidak hanya dimaknai sebagai perubahan prosedural, tetapi sebagai proses penguatan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam seluruh siklus pengelolaan Dana Desa (Pecamuya 2026). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perubahan tersebut berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan serta konteks sosial masyarakat setempat. Pada aspek transparansi, keterbukaan informasi anggaran dan program pembangunan telah diupayakan melalui musyawarah kampung dan penyampaian laporan secara langsung kepada masyarakat. Namun demikian, tingkat aksesibilitas informasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi administrasi dan media informasi yang digunakan. Transparansi cenderung bersifat informatif, belum sepenuhnya dialogis (Daud, Nurkaidah, and Mustapa 2025). Artinya, informasi disampaikan kepada masyarakat, tetapi belum seluruhnya membuka ruang klarifikasi dan umpan balik yang memadai.

Jika dibandingkan dengan regulasi formal yang mengatur kewajiban publikasi APBDes dan laporan realisasi anggaran, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi. Secara normatif, mekanisme transparansi telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara substantif belum sepenuhnya menjamin pemahaman publik terhadap isi dan implikasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola memerlukan penguatan tidak hanya pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga pada kualitas komunikasi publik (Tambaip, Tjilen, and Ohoiwutun 2023a). Dalam konteks akuntabilitas, pelaksanaan program pada umumnya telah

merujuk pada dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya menjaga konsistensi program, beberapa penyesuaian teknis dilakukan akibat kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya. Penyesuaian tersebut menggambarkan fleksibilitas, namun sekaligus menuntut sistem pertanggungjawaban yang lebih sistematis (Syahrudin, Jalal, et al. 2023).

Kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan administrasi keuangan menjadi faktor krusial dalam membangun akuntabilitas yang kuat. Keterbatasan kompetensi teknis dan beban administratif yang tinggi berpotensi memengaruhi ketepatan pelaporan dan dokumentasi. Meskipun demikian, adanya pendampingan dan pembinaan dari pihak terkait turut memperkuat kualitas pengelolaan keuangan. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas berkorelasi langsung dengan efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menunjukkan karakteristik yang unik (Tambaip et al. 2024). Secara formal, musyawarah kampung menjadi ruang partisipatif yang terbuka. Namun, partisipasi yang terjadi cenderung berada pada spektrum antara partisipasi substantif dan simbolik. Kelompok masyarakat tertentu aktif menyampaikan aspirasi, sementara sebagian lainnya lebih bersifat pasif. Hal ini dipengaruhi oleh struktur sosial, relasi kekuasaan, serta budaya komunikasi lokal.

Peran tokoh adat dan struktur sosial lokal memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kualitas partisipasi. Tokoh adat

tidak hanya berfungsi sebagai representasi kultural, tetapi juga sebagai mediator antara pemerintah kampung dan masyarakat. Keterlibatan mereka meningkatkan legitimasi keputusan pembangunan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai lokal dalam tata kelola formal menjadi elemen penting dalam memperkuat *good governance* berbasis kontekstual (Tjilen et al. 2024). Dari sisi efektivitas dan responsivitas, program Dana Desa pada umumnya telah diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama pada aspek infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi. Namun, keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor internal seperti kapasitas manajemen dan faktor eksternal seperti kondisi geografis serta distribusi sumber daya. Respons pemerintah kampung terhadap aspirasi masyarakat menunjukkan kecenderungan adaptif, meskipun belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi tata kelola ke depan memerlukan integrasi yang lebih kuat antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas sebagai satu kesatuan sistem pembangunan berkelanjutan (Syahrudin and Tambaip 2023).

Faktor struktural menjadi determinan utama dalam membentuk kualitas tata kelola Dana Desa di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas manajerial aparatur kampung berimplikasi langsung terhadap efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program. Kompetensi teknis dalam administrasi keuangan, pengarsipan dokumen, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban masih memerlukan

penguatan berkelanjutan (Syahrudin, Tambaip, et al. 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola tidak dapat dilepaskan dari investasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi utama akuntabilitas dan profesionalisme. Selain itu, sistem pendampingan dan supervisi dari pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan kesesuaian implementasi dengan regulasi yang berlaku (Tambaip and Tjilen 2023). Pendamping desa dan mekanisme monitoring berkala berkontribusi dalam mengurangi potensi kesalahan administratif serta meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur. Namun, efektivitas supervisi seringkali dipengaruhi oleh intensitas kunjungan, koordinasi antarlevel pemerintahan, serta keterbatasan sumber daya pengawas itu sendiri. Dengan demikian, penguatan sinergi vertikal antara pemerintah kampung dan pemerintah daerah menjadi prasyarat penting dalam membangun tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan.

Kendala geografis dan aksesibilitas wilayah juga menjadi faktor struktural yang signifikan. Karakteristik wilayah yang relatif terpencil berdampak pada distribusi logistik, akses informasi, serta mobilitas aparatur dan masyarakat. Biaya operasional yang lebih tinggi dan keterbatasan infrastruktur komunikasi memengaruhi kecepatan pelaksanaan program serta efektivitas pengawasan. Dalam konteks ini, tata kelola Dana Desa tidak hanya berhadapan dengan tantangan administratif, tetapi juga dengan realitas spasial yang memerlukan pendekatan kebijakan yang kontekstual dan fleksibel. Di sisi lain, faktor kultural turut membentuk dinamika tata kelola di tingkat kampung (Tjilen et al.

2023). Budaya lokal memengaruhi pola partisipasi dan mekanisme pengambilan keputusan, di mana relasi sosial dan penghormatan terhadap tokoh adat memainkan peran sentral. Modal sosial yang tercermin dalam solidaritas komunitas dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah kampung menjadi kekuatan potensial dalam mendukung implementasi program. Tingginya kepercayaan publik dapat memperkuat legitimasi kebijakan, namun sebaliknya, jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, dapat menimbulkan sikap apatis. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya lokal dengan prinsip *good governance* menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola Dana Desa yang responsif dan berkelanjutan (Tambaip, Tjilen, Riyanto, et al. 2023).

Implikasi tata kelola Dana Desa terhadap pembangunan berkelanjutan di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa kualitas tata kelola berbanding lurus dengan keberlanjutan program pembangunan. Tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat. Keberlanjutan dalam konteks ini tidak semata-mata diukur dari keberlangsungan fisik proyek, melainkan dari kemampuan kelembagaan lokal dalam memelihara, mengembangkan, dan mengevaluasi hasil pembangunan secara konsisten. Dampak pengelolaan Dana Desa terlihat pada dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Secara sosial, peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung memperkuat kohesi dan rasa memiliki terhadap program pembangunan (Tambaip,

Tjilen, and Ohoiwutun 2023b). Secara ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan berkontribusi pada peningkatan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi lokal. Sementara itu, pada aspek kelembagaan, praktik administrasi yang semakin sistematis mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih profesional di tingkat kampung. Ketiga dimensi tersebut saling terkait dalam membangun fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Menjaga keberlanjutan hasil pembangunan di wilayah terpencil menghadirkan tantangan tersendiri. Keterbatasan aksesibilitas, minimnya dukungan teknis berkelanjutan, serta fluktuasi kapasitas aparatur kampung berpotensi menghambat pemeliharaan program. Selain itu, ketergantungan pada transfer fiskal tanpa diimbangi dengan penguatan ekonomi lokal dapat mengurangi daya tahan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada realisasi anggaran, tetapi juga pada penguatan sistem dan kapasitas lokal. Berdasarkan temuan penelitian, formulasi model transformasi tata kelola Dana Desa perlu mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu siklus pengelolaan yang utuh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Transparansi menjadi prasyarat keterbukaan informasi, akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban administratif dan moral, sedangkan partisipasi memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan. Ketiga prinsip tersebut harus dioperasionalkan secara simultan agar menghasilkan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap dinamika lokal (Tambaip et al. 2024).

Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi strategi utama dalam mendorong transformasi tersebut. Peningkatan kompetensi teknis aparatur kampung, pelatihan manajemen keuangan, serta penguatan literasi administrasi masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem tata kelola yang berdaya tahan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah kampung dan masyarakat perlu dilembagakan melalui forum partisipatif yang berkelanjutan, sehingga pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan berbasis kebutuhan dan aspirasi kolektif. Secara teoretis, temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian *good governance* pada level desa dengan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam wilayah terpencil. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan tata kelola Dana Desa di daerah dengan karakteristik serupa, terutama dalam aspek kapasitas kelembagaan dan integrasi nilai budaya lokal. Selain itu, penelitian ini relevan sebagai dasar pengembangan model evaluasi kebijakan publik berbasis lokalitas yang adaptif terhadap kondisi sosial, geografis, dan institusional setempat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola Dana Desa di Kampung Sagare, Distrik Awyu, Kabupaten Asmat, belum sepenuhnya memenuhi prinsip *good governance*, namun telah memperlihatkan dinamika perbaikan yang progresif. Aspek transparansi dan akuntabilitas secara administratif telah berjalan sesuai ketentuan formal, terutama dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, meskipun masih menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya

manusia dan kendala geografis. Partisipasi masyarakat telah difasilitasi melalui mekanisme musyawarah kampung, tetapi dalam praktiknya masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Efektivitas dan responsivitas program pembangunan menunjukkan hasil yang relatif positif, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meskipun keberlanjutan program masih memerlukan penguatan sistem pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Secara konseptual, transformasi tata kelola Dana Desa memerlukan integrasi yang lebih kuat antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu siklus pengelolaan yang adaptif dan kontekstual. Penguatan kapasitas aparatur kampung, optimalisasi peran masyarakat dalam pengawasan, serta peningkatan kolaborasi antaraktor menjadi strategi kunci dalam mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi prinsip *good governance* tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi sebagai proses institusional yang mendorong efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Daud, Penisia, Nurkaidah Nurkaidah, and Zainuddin Mustapa. 2025. "Transparansi Pelayanan Publik Di Era Digital Pada Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Perbatasan Nunukan." *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration* 4(2):128–38.

Handraini, Helti, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Hendra Naldi. 2024. "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11(2):601–8.

Kardina, Mutia, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Hendra Naldi. 2024. "Implementasi Desentralisasi Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Di Indonesia." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 11(2):609–14.

Al Ma'ruf, Muhammad Khabib, Alya Zulfana Rahman, Restu Adiningtyas, Ayu Ananda, and Ilhan Fauzi. 2024. "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4(2):159–79.

Pecamuya, Robertus. 2026. "Reformasi Birokrasi Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Merauke: Faktor Struktural, Kultural, Dan Tantangan Implementasi." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2(1):100–114.

Saputra, Ricky, Muhammad Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, and Isma Nurila. 2025. "Politik Hukum Dana Desa Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan." *Journal Of Law And Social Society* 2(2):9–30.

Solissa, Ayu Astri, Sharfina Juliana, Putri Afrillia, and Wahjoe Pangestoeti. 2025. "Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan

- Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan.” *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary* 2(1).
- Suriadi, Hari. 2025. “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia: Kajian Teoretis Atas Prinsip, Tantangan Dan Strategi Implementasi.” *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan* 1(1):42–54.
- Suryani, Anni, and Andi Firmansyah. 2026. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Togondeng.” *Capacity Journal of Amkop* 4(1):7–12.
- Syahrudin, Syahrudin, Nur Jalal, Marthen A. I. Nahumury, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. “Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Untuk Mengangkat Potensi Kampung Menuju Desa Mandiri.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 8(3):576–86.
- Syahrudin, Syahrudin, and Beatus Tambaip. 2023. “Implementation of the Independent Campus Learning Policy ”MBKM”: An Overview from the Perspectives of Students and Lecturers.” *Journal of Education Research and Evaluation* 7(3):351–61. doi:10.23887/jere.v7i3.61918.
- Syahrudin, Syahrudin, Beatus Tambaip, Alexander Phuk Tjilen, Pulung Riyanto, Nur Jalal, Paul Adryani Moento, Muhammad Novan Prasetya, and Syahrabudin Husein Enala. 2023. “Membangun Karakter Positif Dan Kepemimpinan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Merauke.” *KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(3):95–105.
- Tambaip, Beatus, Pulung Riyanto, Alexander Phuk Tjilen, Ilmu Administrasi Negara, and Universitas Musamus. 2024. “Penguatan Sistem Manajemen SDM Untuk Peningkatan Kinerja Pendidikan Di Lingkungan Desa.” 1(10):1611–19.
- Tambaip, Beatus, and Alexander Phuk Tjilen. 2023. “Analisis Kebijakan Publik Dalam Derajat Kesehatan Di Papua.” *Jurnal Kebijakan Publik* 14(1):101–10.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023a. “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke.” *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6(1):97–106.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, and Yosephina Ohoiwutun. 2023b. “Model Transformasi Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik.” *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(1):1–9.
- Tambaip, Beatus, Alexander Phuk Tjilen, Pulung Riyanto, and Yosephina Ohoiwutun. 2023. “Higher Education Transformational Leadership in Papua: Analysis of Behavioral and Competency.” *Eurasian Journal of Educational Research* 106(106):266–79.
- Tjilen, Alexander Phuk, Beatus Tambaip, Budi Dharmawan, Adrianus Adrianus, Pulung Riyanto, and Yosephina Ohoiwutun. 2024. “Engaging Stakeholders in Policy Decision-Making for Food Security

- Governance: Identification, Perception, and Contribution.” *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 8(1):144–54.
doi:10.22495/cgobrv8i1p12.
- Tjilen, Alexander Phuk, Ruloff Fabian Yohanis Waas, Samel Watina Ririhena, Beatus Tambaip, Syahrudin Syahrudin, Yosephina Ohoiwutun, and Riska Dwi Prihandayani. 2023. “Optimalisasi Potensi Desa Wisata Melalui Manajemen Pengelolaan Yang Berkelanjutan: Kontribusi Bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal.” *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2(6):38–49.
- Wulandari, Mustika, Pradita Mawardani, Zaqi Rohman, and Suci Hayati. 2025. “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Kasus Di Provinsi Lampung.” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2(3):3752–63.